

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Artadi, Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara, 2014, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH UNAIR, Surabaya.
- Hadjon, M Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Inrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Perspektif Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pendit, S Nyoman, 2003, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1995, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Mas.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.

Salim H S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Univ. Press., Surabaya.

Siahaan, N. H. T, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta.

Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sumitro, Roni Hanityo, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2015, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafrudin, Ateng, 2012, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yoeti, Oka, 2003, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.

Jurnal

Kusdamayanti, 2008, “Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Malang”, *Sosial Ekonomi Kehutanan*, Vol. 5 No. 2 Juni 2008.

Internet

Javlec Indonesia, “Memotret Konsep dan Realitas PHBM Perhutani”,
<http://javlec.org/memotret-konsep-dan-realitas-phbm-perhutani/> diakses
pada 20 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum
(PERUM) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 124).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 14).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663).

Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor: 682/KPTS/DIR/2009 Tentang
Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.